Penerapan Sumpah *Li'an* dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru)

Mohamad Jusuf Husain Isa

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap

E-mail: jusuf638@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the application of the oath in the case of divorce on the grounds of adultery on the Religious Barru and to determine the extent to which legal consequences oath in divorce on the grounds of adultery. The results showed that of the many divorce cases received no excuse for fornication 'use of practice in the courts against this divorce case is singular in general they use the term misuse or lack rukunan Causes affair household, adultery is only used as a reason for the appearance of factors behind the occurrence of disputes and contention. Settlement on the grounds of adultery divorce case filed by the husband or wife has been provided for in Article 87 and 88 of Law No. 7 of 1989 that focuses on the verification system. Divorce divorce cases when it can not be proved by witnesses who know the 4 events occurred adultery, can be verified by oath Li'an. After a husband and wife swears by the realization divorce Li'an and perkawinan interruption for long, the children were not related lineage wives and husbands are not entitled to anything against women who conceived while contested divorce cases on the grounds of adultery appropriate resolution on civil procedural law in generally.

Keywords: Li'an Oath; Divorce; Adultery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sumpah dalam perkara perceraian atas alasan zina pada Pengadilan Agama Barru dan untuk mengetahui sejauh manakah akibat hukum sumpah dalam perceraian dengan alasan zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak perkara perceraian diterima belum ada yang menggunakan alasan karena zina. Praktik di pengadilan terhadap perkara perceraian ini secara tunggal umumnya mereka menggunakan istilah penyelewengan atau perselingkuhan yang mengakibatkan ketidak rukunan rumah tangga, penampilan alasan zina hanya dijadikan faktor melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diajukan oleh suami atau istri telah diatur dalam Pasal 87 dan 88 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menitik beratkan pada sistem pembuktian. Perkara cerai talak bila tidak dapat di buktikan dengan 4 orang saksi yang mengetahui terjadi peristiwa zina, dapat dibuktikan dengan sumpah li'an. Setelah suami istri bersumpah maka terwujudlah perceraian dengan cara li'an dan perkawinan putus selama lamanya, anak yang dikandung istri tidak ada hubungan nasab dan tidak berhak sesuatu terhadap suami ibu yang mengandungnya sedangkan perkara cerai gugat dengan alasan zina penyelesaiannya sesuai hukum acara pada perdata umum

Kata Kunci: Sumpah Li'an; Perceraian; Perzinahan

1. Pendahuluan

Perkawinan memuat pengertian yuridis dari perkawinan yaitu, ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam ikatan tersebut dapat terjadi penyelewengan dan pengkhianatan salah satu pihak misalnya saja terjadi perselingkuhan dan hal inilah dibolehkan terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang awalnya dibina dengan susah payah dan berakhir dengan suatu perceraian.

Sementara tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah demikian yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak selamanya perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai cita-cita dan tujuan tersebut, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan pembinaannya secara baik tetap pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.

Perceraian atau talak adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali dengan alasan yang benar. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah.

Karena itu, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian, dengan perkataan lain bahwa, perceraian itu adalah *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadi perceraian dilaksanakan.

Hal itu sesuai dalam ajaran agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan, tetapi kebahagiaan tidak tercapainya dan selalu berada dalam penderitaan. Dalam agama Islam, perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati, tetapi tidak pula mempermudah. Terjadinya perceraian boleh dilakukan tetapi betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa, perceraian dalam Islam pada prinsipnya diharamkan, ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah yang mengisyaratkan bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah sebagaimana hadis

¹ Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Ibnu Umar, *"Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak /perceraian."*²

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu, seperti yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di hadapan pengadilan. Perceraian dapat dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga, baik pelanggaran terhadap norma-norma agama, maupun terhadap norma-norma hukum.³

Sebelum memproses sebuah perkara perceraian, pengadilan wajib memberikan nasihat dan arahan kepada suami dan istri yang akan bercerai serta mengusahakan proses pendamaian antara kedua belah pihak atau lazim disebut dengan proses mediasi. Proses ini bertujuan agar perceraian dapat digagalkan, sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah SWT membenci perceraian karena dengan perceraian, maka akan terjadi putusannya hubungan suami dan istri. Tidak hanya hubungan antara suami dan istri, namun juga perceraian akan memutus silaturahmi yang telah terjalin antara pihak keluarga suami dan istri. Dalam HR.Abu Daud dan Majah dari Ibnu Umar *"Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah Thalaq"*⁴

Salah satu asas yang dianut oleh Hukum perkawinan nasional adalah mempersulit terjadi perceraian, hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama Islam, karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Berlainan halnya dengan putusannya perkawinan karena kematian, sebab hal ini merupakan takdir Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan Pengadilan. Kemudian disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Bila terjadinya perzinahan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau istri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perzinahan akan merasa kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan. Ketenteraman, kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan, tidak dapat terujud malah keresahan semakin berkepanjangan. Keadaan demikian, pihak yang merasa tersekiti menyelesaikan masalahnya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan sebagai sarana penyelesaian perkara yang efektif, guna mendapatkan penyelesaian yang dihadapi dalam rumah tangganya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan dan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdapat beberapa hal, pertama disebutkan adalah Zina (baik yang dilakukan oleh suami atau istri). Pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, pertama juga disebutkan adalah salah satu pihak berbuat zina.

² Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2000), h. 32.

³ Solahudin Pugung, *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*, Penerbit Djambatan, 2010, h.15

⁴ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Sinar Sakti, 2015, h.61

Alasan perceraian menurut berbagai perundang-undangan pertama-tama disebut adalah zina, perzinahan mungkin dianggap sebagai bentuk penghianatan terhadap kesetiaan suami istri, namun benar atau tidaknya suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang sebagai alasan perceraian berdasarkan pula bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Masalah pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara memberi keyakinan kepada Pengadilan (para hakim) atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau bantahan terhadap suatu gugatan.

Pembuktian di muka sidang adalah merupakan hal yang penting dalam hukum acara, sebab Pengadilan dalam hal ini para hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan Pengadilan secara umum dan khususnya pada Pengadilan Agama adalah sumpah.

Perkara perceraian yang diajukan dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedang ia tidak dapat melengkapi buktinya dan pihak lawan menyanggah alasan tersebut dan hakim menilai bahwa perkara itu bukan tidak ada pembuktian sama sekali, serta upaya penenguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh oleh pihak yang berperkara, karena itu menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hakim karena jabatannya menyuruh suami atau istri bersumpah.⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembahasan kali ini akan dikaji persoalan analisis penerapan sumpah *li'an* dalam perkara perceraian atas alasan zina yang dilakukan salah satu pihak, dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sumpah dalam perkara perceraian atas alasan zina pada Pengadilan Agama Barru dan untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum sumpah *li'an* dalam perceraian dengan alasan zina.

2. Metode Penelitian

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu hukum yang meneliti data-data primer. Dimana, data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan penelitian eksperimental.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan informan terdiri dari Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Barru, serta pihak yang berperkara, yang perkaranya sekaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan studi lapangan.

3. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barru

Dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara-orang orang yang beragama Islam dalam bidang

⁵UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 2.

perkawinan dalam hal perceraian baik yang diajukan oleh suami maupun diajukan oleh istri. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi dasar dan patokan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian.

Perkara yang diterima pada pengadilan Agama Barru, sebagai lembaga kehakiman yang menyelesaikan perkara di tingkat pertama, cukup mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya ummat Islam, dimana masyarakat telah mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Barru

Tahun	Permohonan	Gugatan	Total
2014	70	326	396
2015	73	329	402
2016	76	461	537
2017	80	328	408
2018	104	121	225
Jumlah	403	1.565	1.968

Sumber: Pengadilan Agama Barru Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2014 s/d 2018, volume perkara (perkara permohonan dan gugatan) sangat tinggi jumlah yang diterima oleh Pengadilan Agama Barru, total seluruhnya 1.968 yaitu 403 perkara permohonan (*Volunter*) yang meliputi Isbat nikah, Dispensasi Nikah, Wali *adhal* dan Penetapan ahli waris. Dan perkara gugatan (*contentiosa*) sebanyak 1.565 yang meliputi perkara perceraian, Poligami, harta bersama dan warisan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum, yakni melalui Pengadilan Agama serta dapat membuktikan bahwa Pengadilan Agama dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia guna mendapat keadilan, dan kepastian hukum.

Kemudian perkara perceraian yang dimaksud seperti yang diajukan pada Pengadilan Agama Barru sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara perceraian yang dijukan pada pengadilan Agama Barru

Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Total
2014	70	326	396
2015	73	329	402
2016	76	461	537
2017	64	264	328
2018	95	328	423
Jumlah	378	1.708	2.086

Sumber: Pengadilan Agama Barru tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 s/d 2018 menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama Barru, masih didominasi oleh perkara cerai gugat, yaitu sebanyak 1.708 perkara, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 378 perkara, total seluruhnya perkara perceraian berjumlah 2.086. Dari keseluruhan perkara gugatan sebanyak 1.565

sebagaimana pada tabel sebelumnya 2.086 perkara adalah perkara perceraian, ini menunjukkan bahwa perkara perceraianlah yang mendominasi dalam 5 tahun terakhir pada Pengadilan Agama Barru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dibenarkan oleh informan, yang dikemukakan oleh Dra. Siti Hasnani Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Barru bahwa: *"Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru karena masyarakat lebih memahami terhadap fungsi dan peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian masalah rumah tangga, tetapi kadang pihak hendak bercerai namun setelah menjalani proses di persidangan ternyata keduanya berdamai."*

Dari sekian banyak gugatan perceraian yang diterima sebagaimana tersebut di atas, tetapi tidak seluruhnya berakhir dengan putus perkawinan, dalam setiap persidangan upaya perdamaian tetap dilakukan baik melalui proses mediasi maupun melalui majelis hakim dipersidangan. Menurut Drs. Gunawan, MH, Dra Sitti Musyayyadah, H, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Rusni, S.Hi (Hakim). Bila upaya perdamaian berhasil, maka pihak yang perkara mencabut perkaranya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula.

Sesuai informasi dari Firman bin Sakka salah satu pencari keadilan pada pengadilan Agama Barru, menyatakan bahwa: *"Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, terlebih dahulu majelis hakim mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara."* dan menurut Said bin Kahar menyatakan bahwa: *"Hasil upaya penasihatan yang dilakukan oleh majelis hakim, ternyata saya berhasil rukun kembali bersama istri seperti semula."* Dengan demikian Pengadilan Agama bukanlah lembaga perceraian tetapi adalah badan peradilan yang salah satu fungsinya menyelesaikan masalah rumah tangga bagi orang-orang yang beragama Islam.

4. Tinjauan Umum tentang Li'an

Perceraian menurut Subekti adalah *"Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu."*⁷ Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut "furqah", yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai salah satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".⁸ Talak (Perceraian), diambil dari kata "ithlaq" yang artinya "melepaskan atau meninggalkan". Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dan perceraian.⁹

Adapun alasan-alasan perceraian yakni:¹⁰

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 20.

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 17.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 147.

¹⁰ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015), h. 61-62.

kemampuannya

3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. suami melanggar taklik talak
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Perceraian dapat diakhiri atas kehendak oleh suami maupun istri. Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu:¹¹

1. Talak
2. *Illa*
3. *Li'an*
4. *Zhihar*

Adapun pada pembahasan kali ini, akan dikaji persoalan *li'an*. Perkawinan dapat putus karena *li'an*. *Li'an* diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'annah* (saling melaknat).¹²

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, disebut demikian karena suami istri yang saling ber-*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika ia berbohong atau pernyataannya tidak benar.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *li'an* berarti sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup. Menurut istilah Hukum Islam *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima, disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

¹¹Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, h. 66.

¹²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 157

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 238.

Sebagaimana firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدَهُمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٧ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Terjemahnya:

(6) Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (7) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (8) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nur/24:6-9).

Jadi dapat dipahami *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya. *Li'an* merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa. Adapun cara melakukan *li'an* yaitu suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengikaran tersebut dusta.

Adapun jenis *li'an* yakni:

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Jika ada laki-laki yang menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan *me-li'an* atau mengadakan *mula'ana*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina.
- b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya.
- c. Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya, dan ia tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran empat orang saksi. Bentuk sumpah yang dilakukan oleh seorang suami adalah sumpah sebanyak empat kali bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Dan kemudian dalam sumpah kelimanya, jika ia berbohong atau berdusta, maka ia siap dilaknat oleh Allah akan menimpa dirinya.

5. Analisis Penerapan Sumpah Li'an dalam Perceraian atas Alasan Zina

Perceraian yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, baik yang diajukan oleh suami maupun istri, pada prinsipnya hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pemeriksaan perceraian baru dapat dilakukan setelah pengadilan dan mediator gagal mendamaikan suami-istri. Perceraian dengan zina yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak dan yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat

Masalah zina merupakan salah satu alasan yang paling univesal untuk memutus suatu perkara di pengadilan Agama disebabkan penjelasan tentang zina secara lengkap dan jelas tidak disebutkan dalam peraturan perundangan. Seakan menyerahkan sepenuhnya kepada kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh para ahli hukum sepakat bahwa yang disebut zina untuk dapat dipergunakan sebagai alasan cerai adalah hubungan kelamin yang dilakukan suami atau istri dengan orang lain yang berlainan jenis, masalah ini secara khusus dalam pasal 87 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membolehkan perceraian dilaksanakan bila salah satu pihak melakukan zina.¹⁴

Adapun Penjelasan dari H.Ali Rasyidi Muhammad, Lc, Rusni, S.Hi dan Dra Sitti Musyayyadah (hakim) menyatakan bahwa: *"Penyelasaan perceraian dengan alasan zina terkait dengan pembuktian di persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti tertulis, saksi, pengakuan dan sumpah."* Alasan zina yang diajukan oleh istri dapat dikuatkan dengan bukti tertulis berupa putusan pidana terhadap perbuatan zina, dengan bukti ini Pengadilan Agama dapat dengan mudah menerima alasan perceraian, meskipun dalam Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tidak disebutkan mengenai alat bukti putusan pidana, bukan berarti putusan pidana tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap perkara perceraian atas dasar zina. Dari segi hukum pembuktian, Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan oleh para pihak.

Bukti pengakuan oleh H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Rusni, S.Hi dan Dra Sitti Musyayyadah (hakim) menjelaskan bahwa: *"Terhadap orang yang dituduh berzina, dan ia mengaku telah berbuat zina maka dengan sendirinya penggugat tidak perlu membuktikan tuduhannya itu sebab pengakuan merupakan bukti mengikat dan menentukan."* Pengakuan murni dari pihak lawan melenyapkan wajib bukti kepada penggugat karena pengakuan yang dilakukan dimuka sidang pengadilan Agama merupakan bukti sempurna apa yang telah diakuinya, dengan adanya pengakuan tergugat, penggugat dianggap berhasil membuktikan dalil gugatan perzinahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Dalam kaitannya dengan bukti saksi, para informan menyatakan bahwa cukup dengan dua orang saksi yang keduanya betul-betul melihat langsung peristiwa zina yang dilakukan (*in flagrante delicto*), menilai kekuatan kesaksian harus menjadi perhatian secara khusus, kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan persamaan kesaksiannya terhadap peristiwa zina, keterangan dua orang saksi yang saling berbeda atau berdiri sendiri, hakim mempunyai kebebasan menilai salah satu dari dua orang saksi yang telah menerangkan betul-betul secara jelas melihat peristiwa zina, keterangan satu saksi yang memenuhi syarat suatu kesaksian menjadi bukti pertama yang menjadi dasar dilakukannya sumpah pelengkap (*suppletoireed*). Inilah maksud Pasal 88 ayat 2 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jogyakarta: Liberty, 1982), h. 2.

perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan suami berzina, penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku pada peradilan umum.

Perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri dengan alasan zina, menurut H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusni, S.Hi (Hakim) adalah dilakukan dengan cara menghadirkan 4 orang saksi, bila hal ini tidak terpenuhi maka suami melakukan sumpah *li'an* dan bilamana tidak terpenuhi syarat sumpah *li'an* maka penyelesaian perkara cerai yang dijukan suami dapat dilakukan seperti penyelesaian perkara cerai gugat. Jika suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagaimana maksud dalam Al-Quran surat An Nur, maka pasal 87 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 menghendaki, suami dapat meneguhkan alasan perceraian dengan melakukan sumpah *li'an*, pihak istri berhak menyangkal atau menolak alasan perceraian tersebut dengan melakukan sumpah *li'an*, bilamana suami istri saling *meli'an* maka terwujudlah perceraian, inilah maksud Pasal 88 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perceraian yang diajukan oleh suami dengan alasan istri berzina, penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

Menurut penjelasan H. Ali Rasyiddin Muhammad, Lc. Dan Dra.Sitti Musyayyadah Dan Rusni, S.Hi, (Hakim) yakni: *"Bila istri tidak bersedia bersumpah, syarat sumpah li'an tidak terpenuhi dan tidak terwujud perceraian dengan cara li'an, selanjutnya penyelesaiannya berdasarkan pada hukum acara seperti pada perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat."* Dengan demikian penerapan sumpah *li'an* hanya dapat diterapkan pada perkara perceraian dengan alasan zina yang diajukan oleh suami.¹⁵

Sumpah *li'an* dalam perceraian adalah akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh istri, menurut informan, H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusni, S.Hi (Hakim) menyatakan bahwa: *"Berbuatan zina adalah hubungan biologis jenis laki-laki dengan perempuan sebelum ikatan perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah menurut agama adalah perkawinan terpenuhi rukun dan syaratnya."*

Dalam syariat Islam perbuatan zina adalah perbuatan terlarang, perzinahan bisa terjadi dikarenakan, sebagaimana menurut Informan H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusni, S.Hi (Hakim) menyatakan bahwa: *"Dalam ajaran Agama dikatakan jangan mendekati zina, ini dilarang mendekati, apalagi untuk melakukannya, dan menurutnya bahwa besar kemungkinan zina yang dilakukan oleh istri karena kurang pemahaman dan pengamalan terhadap agama dan pengaruh biaya hidup, istri hendak hidup mewah sementara suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya istri mencari jalan dengan berbuat sesuatu apapun sekalipun melanggar ajaran agama."*

Kenyataannya perselingkuhan hingga perzinahan justru sering terjadi bagi orang-orang yang berpendidikan dan orang yang telah memahami agama, hal ini terjadi karena keimanan saat itu berada pada posisi sedang menurun. Iman seseorang selalu mengalami perubahan. Pada kondisi iman sedang menurun, seseorang mudah dikusai oleh hawa nafsu sehingga dapat berbuat semaunya. Pada kondisi itupula, mahluk bernama iblis dapat berperan dengan mempermainkan manusia hingga menjerumuskan kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perzinahan terjadi sangat dipengaruhi dari keadaan keimanan seseorang, dalam menjalankan dan mematuhi ajaran agama. Maka Iman seseorang sangat dibutuhkan, iman yang kuat adalah merupakan benteng dan filter dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan zina ini pada Pengadilan Agama Barru, menurut informan H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Dra.

¹⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 3.

Sitti Musyayyadah dan Rusni S.Hi (Hakim) yakni: *“Dalam pemeriksaan perkara perceraian sering terungkap melalui keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang sering menerangkan bahwa ia telah melihat langsung perzinahan yang dilakukan oleh pihak berperkara. Namun, dalam surat gugatan, penggugat hanya mengungkap alasan adanya perselingkuhan yang menyebabkan perselisihan terjadi dalam rumah tangganya dan dalam praktik di Pengadilan terhadap perkara perceraian dengan alasan zina, secara tunggal umumnya mereka menggunakan istilah penyelewengan atau perselingkuhan dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain. Dari kedua istilah itulah yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, penampilan alasan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.*

Menurut M. Syukri Bin Makka (Pencari keadilan) bahwa *“Permohonan cerai yang telah diajukan dengan alasan adanya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena istri telah menikah dengan laki-laki lain dan dengan pernikahannya itulah ia telah melahirkan.”* Mencermati hal ini, alasan cerai yang semestinya diungkapkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah perceraian dengan alasan zina. Ini terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pencari keadilan, bahwa zina adalah salah satu alasan perceraian, kurang memahami tata cara penyelesaian perceraian di persidangan dan masyarakat masih punya peradaban tinggi dalam menutupi aib seseorang, sehingga tidak menonjolkan alasan zina dalam surat gugatan dan juga karena sulitnya menghadirkan sejumlah 4 orang saksi yang mengetahui terjadi peristiwa zina karena perkara perceraian dengan alasan zina secara tunggal yang diajukan oleh suami sulit pembuktiannya, karena lembaga Peradilan Agama tetap berpegang kepada asas *in flagrante delicto* yaitu pembuktian dengan empat orang saksi laki-laki yang betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri sepasang pria dan wanita sedang berhubungan kelamin.

6. Akibat Hukum Sumpah Li'an dalam Perceraian dengan Alasan Zina

Perceraian yang diajukan suami terhadap istri dengan alasan selain alasan zina, maka pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengizinkan suami untuk menjatuhkan talak terhadap istri, lain halnya perceraian dengan cara sumpah *li'an*, Pengadilan memutuskan perkawinan dengan menjatuhkan talak terhadap suami dengan talak bain kubra. Menurut H.Ali Rasyidin Muhammad, Lc, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusni, S.Hi, (Hakim) bahwa: *“Apabila suami istri telah saling meli'an di persidang maka terwujudlah perceraian dengan cara li'an. Dan talak yang dijatuhkan terhadap suami adalah talak bain kubra, Putusan pengadilan terhadap perkara ini amarnya berbunyi menjatuhkan talak bain kubra pemohon terhadap termohon.”* Talak bain kubra, dijatuhkan karena perceraian dengan cara *li'an*, perceraian ini berdampak pada putusnya perkawinan untuk selamanya. Suami istri saling bersumpah akan memunculkan rasa kebencian diantara keduanya, saling tidak percaya telah melekat pada diri masing-masing, rasa cinta dan kasih sayang telah hilang. Perkawinan bertujuan mencari ketenteraman dan cinta kasih, setelah saling bersumpah tidak mendapatkan lagi tujuan itu. Dalam kitab fiqhi, apabila suami istri saling meli'an maka jatuhlah perceraian antara keduanya dan haramnya berkumpul kembali dan tidak dapat dicabut dengan adanya perceraian itu, hubungan suami istri putus selamanya.

Bila perceraian ini terjadi akan diliputi rasa malu pada diri dan kepada lingkungan keluarga sekitarnya, sehingga tipis harapan untuk bersatu kembali sebagai suami istri, kondisi rumah tangga yang demikian lebih banyak mudaratnya dari pada

masalahatnya, dalam ajaran fikhi dikatakan perceraian untuk selamanya karena tujuan perkawinan sulit terpenuhi lagi.

Dalam kaidah fikhi “menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. Untuk menghindari kemudaratan terhadap hubungan suami istri penulis berpendapat sedapat mungkin perceraian dilakukan untuk selama lamanya. Dan perceraian dengan cara ini telah menelantarkan rumah tangga akibat dari perbuatan istri, karena itu istri dalam kategori *nusyuz*, istri yang *nusyuz* menurut para informan dan pendapat penulis mengakibatkan gugurlah kewajiban suami kepada istri yang berupa:

1. Nafkah
2. Tempat tinggal
3. Biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri.

Inilah maksud Pasal 80 Kompilasi hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur memberi nafkah, biaya rumah tangga dan keperluan istri lainnya apabila istri *nusyuz*. Adapun terhadap harta penghasilan bersama suami istri (Harta bersama) oleh H. Ali Rasyidin Muhammad, Lc dan Dra. Sitti Musyayyadah menyatakan bahwa istri berhak atas harta bersama, meskipun perceraian dengan cara *li'an*, dan sebagian informan menyatakan bahwa ada diantara fukaha berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan harta bersama bilamana dalam keadaan *nusyuz*. Sedangkan menurut penulis, karena harta bersama adalah hasil jeripaya suami istri yang diperoleh sejak nikah, bila keadaan *nusyuz*-nya istri terjadi setelah memperoleh harta bersama dalam perkawinan, maka istri berhak mendapat bagian dari harta bersama.

Terhadap anak yang dikandung istri, adalah hasil perzinahan istri dengan orang lain, bukan hasil pembuahan dari suami sehingga anak tidak ada kaitan kekeluargaan dengan suami ibu yang mengandungnya dan menurut para informan, bahwa anak yang dikandung istri tidak ada hubungan nasab dengan suami ibu yang mengandungnya. Tidak adanya hubungan nasab berarti anak tidak ada keterkaitan keturunan dengan suami, karena itu menurut pendapat penulis bahwa anak tidak berhak terhadap suami ibu yang mengandungnya, berupa:

1. Biaya hadanah.
2. Nafkah.
3. Tidak saling mewarisi terhadap suami ibu yang mengandungnya dan kepada keturunan suami ibu yang mengandungnya.
4. Tidak berhak diwalikan oleh suami ibu yang mengandungnya sebagai wali dalam pernikahan.

Nasab anak menuruti nasab ibunya, dan keluarga ibunya, ibu mewarisi tinggalkan anaknya dan si anak mewarisi kekayaan ibunya, anak dan ibu yang mengandungnya saling mewarisi.

7. Penutup

Penerapan sumpah *li'an* telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka sistem penerapan dalam pemeriksaan cerai talak karena alasan zina yang diatur dalam Al Quran surat An-Nur. ayat 6 dan 7 yakni, harus menghadirkan empat orang saksi. yang yang betul-betul menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan (*in flagrante delicto*). Bila tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi, suami dapat bersumpah dengan sumpah *li'an*, dan untuk menyanggah alasan suami, istri mengucapkan pula sumpah *li'an*. Dengan diterapkannya sumpah ini, maka terwujudlah perceraian karena alasan zina secara *li'an*. Sedangkan dalam pemeriksaan cerai gugat karena alasan zina, dapat dilakukan dengan cara menurut hukum acara

pada perdata umum. Penerapan sumpah ini, karena perzinahan yang dilakukan. Perceraian terjadi dengan cara *li'an* dampaknya terhadap ikatan perkawinan suami istri dan anak yang dikandung istri. Perkawinan bertujuan mencari ketenteraman dan cinta kasih sedangkan, keduanya sudah tidak mendapatkan tujuan itu setelah saling bersumpah atas tuduhan perzinahan, muncul rasa kebencian diantara keduanya, dan kasih sayang telah terhapus. Karena itu akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan bila ikatan perkawinan dipertahankan. Sehingga, perceraian dengan sumpah *li'an* ini mengakibatkan perkawinan akan putus selamanya dan gugurlah hak istri tentang nafkah dan tempat tinggal. Terhadap anak yang dikandung istri, tidak ada hubungan nasab dengan suami ibu yang mengandungnya, tidak berhak sesuatu apapun dari padanya, nasab anak menuruti nasab ibunya, ibu dan anak saling mewarisi.

Referensi

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ash Shabuni. 2000. *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: Bina Ilmu
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jogjakarta: Liberty
- Solahudin Pugung. 2010. *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*. Penerbit Djambatan
- UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti